

BPK Endus LSM Jadi Penampung Dana

► Hibah dan Bansos dari APBD Rawan Diselewengkan

SEMARANG, TRIBUN - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Firman Agung Sampurna, mengatakan dana hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sangat rawan diselewengkan. Berbeda dengan dana hibah dan bansos dari pemerintah pusat, yang lebih jelas peruntukannya. Baik dari segi program, penerima, pengawasan, dan pelaporannya.

"Sementara, hibah dan bansos yang bersumber dari APBD lebih terbuka. Seringkali program dan penerimanya tidak jelas," kata Firman, usai mengikuti Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, di Crown Plaza Semarang, Kamis (28/11).

Dipaparkannya, hibah dan bansos dari pemerintah pusat untuk pendidikan, semisal BOS, lebih mudah untuk diawasi. Sedangkan, penerima hibah dan bansos di daerah, kebanyakan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang seringkali tidak jelas peran sertanya, untuk menunjang kinerja pemerintah.

"Dari penelusuran kami, banyak LSM yang ternyata bentukan kepala daerah, bentukan kepala SKPD, yang program kerjanya tak jelas," ucapnya.

Ditambahkan, kebanyakan LSM seperti itu tidak terdaftar

STORY HIGHLIGHTS

- Sejumlah bantuan dana hibah dan sosial yang dikucurkan dari APBD banyak diselewengkan di tingkat daerah
- Penerima hibah dan bansos banyak yang tak jelas alamat maupun lembaganya
- BPK mengendus, LSM penerima bantuan hibah dan sosial adalah sejatinya bentukan dari kepala daerah maupun SKPD
- Ke depan, BPK meminta agar pemberian dana hibah dan sosial lebih diperketat aturannya

di Kemenkumham. Dan hanya terdata di Kesbanglinmas setempat.

"Parahnya lagi, hibah dan bansos yang tidak boleh diterimakan setiap tahun, ternyata banyak yang menerima setiap tahun," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya memberi masukan kepada Mendagri, untuk membuat regulasi, yang lebih memperketat penyaluran hibah dan bansos. Disamping itu, ditegaskan Firman, pihaknya juga memperketat audit dan pemeriksaan terhadap penyaluran dana hibah dan bansos.

"Pengetatan yang kami lakukan mulai dari sisi perencanaan program, pelaksanaan, dan juga laporan pertanggungjawabannya," tegas dia.

Oleh karena itu, disampikannya lebih lanjut, sebelum memberikan hibah dan bansos, Pemda harus dapat menjelaskan kontribusi lembaga penerima terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. "Membantu program pemerintah dalam program apa? Pendidikan kah, kesehatan kah, kebudayaan kah, harus jelas dan terukur," tuturnya.

Disamping itu, prasyarat pemberian hibah dan bansos adalah pemerintah setempat sudah dapat melaksanakan program yang wajib. "Jika banyak kewajiban pemerintah yang sifatnya wajib belum terpenuhi, semisal masih banyak fasilitas umum yang tak layak, ya jangan menganggarkan hibah dan bansos," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Chaerul Amir, mengatakan, temuan dari hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Temuan BPK atau BPKP menurutnya, sebagai jalan masuk untuk mengusut perkara korupsi.

"Dalam hal ini BPK bisa bertindak sebagai auditor dan juga sebagai saksi ahli," kata dia.

Dalam pemeriksaan, menurutnya BPK tidak hanya bekerja sendirian. Namun, juga melibatkan para ahli dalam bidang lainnya. "Semisal ahli IT atau lainnya," tandas dia. (yan)